

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDIA OLEH PEMERINTAHAN NARENDRA MODI MELALUI PROGRAM BBBP (2015 – 2017)

¹Primadiani Difida Widyaputri, ²Gustri Eni Putri

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia

¹primadianidifida@gmail.com, ²gustrieni_putri@uii.ac.id

Abstract

Women empowerment is an attempt to provide power, choice and freedom for women to optimize their potential. At the national level, empowering women requires collective participation between the state as the highest political entity and society as the implementer of women empowerment. India, as a developing country in South Asia, is a country that is seeking to optimize women empowerment through holistic, multi-sector development policies that are capable of having a significant impact on the country's development. Under the leadership of Narendra Modi in his first term, a policy emerged called Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) as a bridge in actualizing women's empowerment in India. The efforts contained in this policy are economic development through empowering abilities to increase economic growth (economically productive), providing guidance on women's participation in the public sphere, guaranteeing women's representation in the world of politics, as well as a culture of mainstreaming women in other sectors. Through the strategies made by Narendra Modi, women are given strength and guarantees from the state to fulfill their personal needs (self-sufficiency).

Keywords: *Women Empowerment, Narendra Modi, BBBP*

Pendahuluan

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah isu transnasional yang saat ini menjadi poros perhatian dunia dengan segala dinamika dan pengaruhnya pada kebijakan. Perempuan dan eksistensinya seringkali termarginalisasi dan mengalami opresi. Pada faktanya, masih banyak perempuan yang terjerat dalam lingkungan yang patriarkis sehingga

perempuan menjadi insan yang dinomorduakan di berbagai sektor (Mareta 2017, 3). Bukan hanya itu, permasalahan perempuan juga tidak terlepas dari peran pemangku kebijakan untuk mengambil langkah yang tepat untuk meresolusikan hal tersebut. Isu perempuan sudah masuk ke tahapan konstitusi dimana keterlibatan perempuan diratifikasi di berbagai macam *platform* baik organisasi internasional maupun rezim internasional (Mareta 2017, 4).

India sebagai negara berkembang di Asia juga mengalami hal serupa, Dimana Perempuan menjadi isu kontroversial untuk dibahas. Melihat banyaknya kasus yang terjadi di India seperti kekerasan dan penindasan terhadap perempuan, diskriminasi gender bagi perempuan yang dianggap lemah, serta beban ganda yang dialami oleh perempuan di India baik dalam lingkup domestik maupun sektor publik. Beberapa kasus yang disebutkan di atas menjadi fenomena yang tak terhindarkan di India karena perempuan masih dianggap sebagai kelompok rentan yang layak mendapatkan diskriminasi (Mareta, 2017, 5). Disampaikan dalam Female Empowerment Index (Femdex) melakukan klasifikasi pada kesetaraan gender di dunia kerja dan kehidupan sosial, India merupakan negara dengan kekerasan terhadap perempuan sebesar 37% (McKinsey&Company 2015, 5). Ditambah lagi, India tidak memiliki perlindungan hukum (*legal protection*) yang besar pada perempuan, jumlahnya hanya sebesar 0.399 saja, padahal adanya kekuatan perlindungan hukum dari pemerintah merupakan aspek yang mampu melindungi perempuan dari jeratan diskriminasi dan kekerasan pada Perempuan (McKinsey&Company 2015, 9).

Adanya pemahaman tentang warisan budaya patriarkis yang masih berkembang sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat India juga menjadi faktor utama perempuan tidak dianggap lebih penting dari laki-laki. Lebih lanjut, sedikitnya partisipasi perempuan di ranah pendidikan formal juga menjadikan perempuan tidak memiliki cakrawala

intelektual yang luas atas hak- hak yang semestinya mereka miliki (Sharma and Manisha 2004, 118). Diperkuat oleh bukti bahwa budaya patriarki yang terus menjalar dan mengepaskan sayap ideologinya ke seluruh penjuru India memperkeruh situasi dan kondisi perempuan di India (Himani 2016, 5).

Ditambah dengan munculnya paradigma yang muncul di masyarakat tentang perempuan yang mendapat stigmatisasi di lingkungan sekitarnya menjadikan perempuan seolah lemah tak berdaya. Secara tidak langsung perlakuan seperti ini yang mengecilkan ruang gerak perempuan di India, sehingga sulit bagi mereka untuk memerdekakan dirinya dari jeratan patriarki. Perempuan seolah dianggap sebagai makhluk dalam kendang yang berada di bawah control laki-laki sebagai bentuk ketaatan. Kondisi ini imenjurus pada ketidakadilan peran laki-laki dan perempuan di India. Ketidakadilan ini berimplikasi pada banyak sektor yang justru menjadi ancaman primordial yang nantinya membawa pengaruh pada sistem negara yang tidak proporsional. Isu domestik seperti diskriminasi gender yang terjadi di India dapat dengan mudah menghancurkan eksistensi India di kancah Internasional.

Adapun dalam menghadapi diskriminasi yang terjadi pada perempuan di India terdapat partisipasi dari pihak ketiga yang membawa pengaruh cukup besar pada dinamika permasalahan ini (Mareta 2017, 11). Pihak ketiga yang dimaksud diantaranya adalah *United Nation (UN) Women* sebagai organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewadahi aspirasi dan memantau arus pergerakan kebijakan pemerintah dalam mengatasi isu-isu perempuan di India. Tuntutan ini berfokus pada poin-poin yang harus menjadi strategi bagi pemerintah India dalam menjalankan agenda politiknya. Poin-poin yang dimaksud adalah sebagai berikut,

“Perempuan memimpin, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat yang setara sistem pemerintahan, dan hidup bebas dari segala bentuk kekerasan berbasis gender; perempuan mempunyai jaminan atas pendapatan, pekerjaan yang layak, dan otonomi ekonomi, dan perempuan serta perempuan muda yang terpinggirkan mempunyai akses terhadap, berpartisipasi dalam dan mencapai pembelajaran, kewirausahaan dan pekerjaan yang berkualitas; dan semua perempuan serta anak perempuan memperoleh manfaat dari penerapan serangkaian norma, kebijakan dan standar yang komprehensif dan dinamis yang mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.” (UN Women 2015, 3).

Bukan hanya UN Women, tetapi juga terdapat juga ratifikasi pada rezim internasional yang dikenal sebagai *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang di dalamnya menjalankan peran sebagai mediator dalam mengeksekusi permasalahan diskriminasi Perempuan di India. Kala itu, CEDAW dengan sangat progresif menekan India untuk menggaungkan nilai-nilai kemanusiaan pada perempuan dan mengadvokasikan perlindungan hukum yang adil (Hasibuan and Sabrina 2023, 109).

Pada dasarnya, kontribusi yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai fasilitator ini tidak dapat berperan begitu signifikan, sebab poin utama untuk mereduksi fenomena diskriminasi gender untuk memberdayakan perempuan sepenuhnya berada pada pembuat kebijakan domestik yang dalam hal ini adalah pemerintah India. Metode yang dapat dilakukan oleh pihak ini hanya terbatas pada bentuk tuntutan dan kecaman yang nantinya menjadi pertimbangan pemerintah India dalam memutuskan kebijakan yang optimal.

Menilik lebih jauh fenomena diskriminasi gender yang terjadi di India juga tidak terlepas dari bagaimana sistem dan tata kelola negara turut memegang andil di dalamnya. Kedua hal ini saling berkesinambungan karena diskriminasi yang dialami oleh perempuan India juga disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan sehingga relasi kuasa yang diterima perempuan mengalami ketimpangan. Pemerintah yang semestinya menyediakan fasilitas ruang aman dalam membentuk kebijakan yang universal tidak bisa menutup mata ketika diskriminasi dan opresi perempuan menyeruak (NDTV 2020).

Kebijakan ideal yang dibuat dengan melibatkan peran perempuan di dalamnya menjadi perpaduan yang proporsional untuk menghentikan budaya diskriminasi gender ini. Terlebih ketika perempuan dalam budaya tradisional merupakan golongan yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi yang kerap kali terjadi menjadikan perempuan sebagai objek yang layak untuk mendapat hal serupa saat ini (Tedjo et al. 2021, 143).

Berkaitan dengan hal tersebut, perdana menteri India, Narendra Modi melihat bahwa pemberdayaan perempuan memegang peran esensial untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sama halnya dengan pembangunan sebuah negara yang harus mempertimbangkan masyarakat sebagai poros perputaran dalam mengambil kebijakan (Khana 2017). Dimana perempuan harus menjadi variabel dalam memutuskan kebijakan yang diterapkan di India.

Selama dua periode masa jabatan yang diampu oleh Narendra Modi, penulis menilik bahwa kebijakan pembangunan holistik yang dicanangkan oleh Narendra Modi mengalami eskalasi yang masif ketika di periode pertamanya terutama tahun 2015-2017 (France24 2019).

Dua tahun masa jabatan Narendra Modi di periode pertamanya sebagai perdana menteri telah menghadapi banyak tuntutan dan kecaman dari dunia internasional karena maraknya kasus diskriminasi gender yang dialami perempuan di India, maka muncullah kebijakan sebagai bentuk solusi untuk menangani fenomena ini. Implikasi yang disampaikan dari lahirnya kebijakan holistik adalah sebuah bentuk upaya pemerintah India untuk mereduksi fenomena ketimpangan gender (Biswasa and Sinhab 2020, 51). Pemerintah India melihat integrasi dan tindakan universal dalam mengerahkan strategi terbaiknya melalui kebijakan dengan harapan semakin banyak masyarakat India yang mencermati pentingnya perempuan dalam pembangunan di India .

India di bawah kepemimpinan Narendra Modi telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang dirasa mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan. Beberapa kinerja yang paling mutakhir yang dilakukan oleh Narendra Modi adalah memberlakukan program yang berbasis pada pengarusutamaan (*mainstreaming*) perempuan (Biswasa and Sinhab 2020, 150). Narendra Modi melihat bahwa semakin banyak perempuan yang berdaya maka secara signifikan mampu berpengaruh pada tata kelola negara yang dinamis (Biswasa and Sinhab 2020, 8).

Hal ini juga diperkuat oleh Pam Rajput selaku akademisi gender dan aktivis berpengaruh dalam wawancaranya bersama Times of India pada tahun 2015 lalu, ia menyatakan bahwa perempuan memang memerlukan adanya pemberdayaan untuk memerdekakan diri mereka sendiri (Ray 2015).

Konsep pemberdayaan perempuan ini kemudian dirumuskan bentuk proses pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan antara dampak yang dihasilkan dari sebuah kebijakan dan implikasinya pada kurun waktu tertentu. Proses yang dimaksud disini adalah sebuah fase dimana terdapat pendekatan multidimensional yang dilakukan pemerintah untuk

menganalisis lebih jauh tentang suatu isu tertentu dengan skema berbasis pada cakrawala intelektual dan pendekatan kemasyarakatan (Sharma and Manisha 2004, 120).

Dengan mempertimbangkan prinsip holistik yang dimaksud di uraian sebelumnya, maka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah India sebagai solusi dalam menanggulangi permasalahan perempuan harus memegang teguh prinsip menyeluruh atau holistik. Di tahun 2015, pemerintah India akhirnya mengeluarkan skema kebijakan *Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)*. Merefleksikan dari kebutuhan perempuan akan keholistikan dari seperangkat keputusan politik, kebijakan *BBBP* merupakan kebijakan yang mengadaptasi pola multi sektoral (Saini 2018, 227).

Kebijakan *BBBP* muncul sebagai jawaban yang diberikan pemerintah untuk perencanaan jangka panjang pada reduksi Child Sex Ratio (CSR) dan isu yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan di bawah tiga kementerian yang bertanggung jawab yakni Pembangunan Perempuan dan Anak, Kementerian Kesehatan & Kesejahteraan Keluarga, dan Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (Saini 2018, 229). Dalam proses pemutakhiran kebijakan ini, pemerintah melihat perempuan harus mendapat kesempatan dan hak yang sama di seluruh penjuru India. Terdapat gambaran jangka panjang dimana kebijakan *BBBP* mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan meskipun hal ini adalah proses kompleks (Parmar and Sharma 2020, 1243).

Inisiatif kebijakan *BBBP* merefleksikan secara komprehensif pada permasalahan disparitas gender yang jika tidak ditanggulangi mampu berdampak negatif terutama di ranah sosial dan ekonomi (G. Kumar 2023, 20). Dalam proses riset panjangnya, kebijakan *BBBP* mengusung konsep interkoneksi antara kampanye kesadaran (*awareness campaign*), perubahan dinamika legislatif, dan sistem pendukung yang melibatkan seluruh warga

negara India. Peluncuran kebijakan ini juga merupakan komitmen penuh pemerintah untuk mengatasi permasalahan berbasis gender dan berfokus pada metode pemberdayaan (G. Kumar 2023, 20).

Di bawah kebijakan *BBBP* yang telah diluncurkan pada 21 Januari 2015, Narendra Modi memastikan upaya pada perempuan India yang sehat jasmani dan rohani, mendapat pendidikan tinggi, dan kesempatan yang terbuka pada segala aspek (Reeta, Gupta and Verma 2021, 181). Bersamaan dengan upaya tersebut, Narendra Modi mengharapkan hasil optimal pada penghilangan diskriminasi berbasis gender, dan perlindungan pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup perempuan di India (Sharma and Borgohain 2022, 5144). Perdana Menteri India, Narendra Modi dengan sangat mendalam menggunakan kebijakan *BBBP* untuk mengatasi permasalahan perempuan demi terwujudnya pembangunan negara. Bahkan dalam pidatonya, Narendra Modi melakukan sanjungan kepada seluruh perempuan sebagai bentuk apresiasi pada perempuan sebagai martabat peradaban bangsa (Gange 2015).

Menganalisis lebih jauh tentang pembangunan holistik, diperkuat oleh artikel "*Holistic Development Not Possible Without Gender Justice: PM Modi*" (2020) menyatakan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi melihat bahwa kesetaraan dan keadilan gender menjadi pionir perubahan yang dalam hal ini menjadi aspek pendukung pembangunan negara. Maka dari itu, tanpa adanya keadilan dan kesetaraan terhadap perempuan pembangunan suatu negara akan terhambat. Kendati demikian, berdasarkan penjabaran di atas tentang lika-liku pemberdayaan perempuan di India dan munculnya kebijakan *BBBP* sebagai skema pembangunan holistik, penulis dapat menilik lebih jauh implementasi kebijakan tersebut dalam mengaktualisasikan pemberdayaan perempuan di India.

Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis konsep pemberdayaan perempuan dan implikasinya pada pembangunan suatu negara, penulis menggunakan teori independensi dan pemberdayaan perempuan yang dicetuskan oleh Hemalata Dandekar pada tahun 1986. Melalui karyanya yang berjudul *“Indian Women’s Development: Four Lenses”* (Dandekar 1986) menuliskan bahwa terdapat empat poin penting dalam melihat pemberdayaan perempuan di India. Adapun empat poin yang dimaksud adalah basis ekonomi perempuan, arena publik dan masyarakat, struktur keluarga dan posisi perempuan dalam profesi politik, dan psikologis/ideologis tentang perempuan dalam budaya masyarakat.

Dalam tulisan (Dandekar 1986, 25) terdapat integrasi dari tiap-tiap variabel yang menghubungkan pemberdayaan (*empowerment*) dengan basis ekonomi perempuan, arena publik dan masyarakat, struktur keluarga independensi karier perempuan, dan psikologis/ideologis tentang perempuan dalam budaya Masyarakat. Munculnya indikator yang diklaim oleh Dandekar sebagai tolok ukur pemberdayaan perempuan di India disebabkan oleh spektrum heterogen yang melihat perempuan memiliki perbedaan kebutuhan, kendala, tantangan, dan aspirasi sehingga empat indikator di atas mampu mengukur sejauh mana upaya pemerintah memanifestasikan pemberdayaan perempuan di India.

Poin utama yang juga merupakan titik puncak pemberdayaan perempuan dilihat melalui aspek ekonomi, dimana pembagian peran yang ideal dalam bekerja juga menjadi indikator yang mampu melihat relasi ketergantungan atau interdependensi antara perempuan dan laki-laki di India (Dandekar 1986, 26). Keterlibatan ekonomi dan produktivitas di India juga berpengaruh soal cara pandang sosial yang mana terdapat labelisasi status sosial ketika perempuan terjun ke ranah publik untuk bekerja di

lapangan, maka dari itu pengukuran aspek ekonomi dilihat dari adanya kesetaraan dalam distribusi ekonomi bagi laki-laki maupun perempuan.

Sementara arena publik dan masyarakat ditafsirkan oleh (Dandekar 1986, 26) sebagai partisipasi publik juga memiliki beberapa indikator yang menunjukkan bahwa perempuan berhak atas penguasaan sumber daya, pengakuan atas hasil produksi, keterbukaan penyampaian aspirasi, pertimbangan perempuan dalam kebijakan, keterwakilan kepentingan perempuan dalam kelompok sosial untuk meningkatkan status perempuan di masyarakat. Dalam teorinya, Hemalata Dandekar juga menyampaikan hubungan egalitarian antara laki-laki dan perempuan dapat mendeterminasikan pembagian peran yang ideal bagi laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik, maupun ranah domestik. Hal ini disebabkan keterlibatan laki-laki dalam ranah domestik juga memiliki substansi yang sama pentingnya dengan partisipasi perempuan di ranah publik.

Disampaikan oleh (Dandekar 1986, 26) bagaimana spektrum struktur keluarga independensi karier perempuan melihat perempuan yang hidup dalam tertutupnya akses ekonomi, budaya patriarki, dan struktur keluarga yang tidak mengedepankan peran perempuan tidak memiliki pola pengaruh yang besar di karier. Spektrum ini banyak dipengaruhi oleh tradisi liberal dimana perempuan sudah semestinya diberikan hak dan kesempatan atas partisipasi politik, pendidikan tinggi, dan pekerjaan profesional.

Poin esensial terakhir adalah persoalan psikologis/ideologis tentang perempuan dalam budaya yang dimaksud dalam lensa (Dandekar 1986, 26) adalah bagaimana nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di India adalah budaya patriarki yang melihat perempuan tidak lebih penting dari laki-laki, sehingga terdapat dominasi maskulin di India dimana laki-laki seolah memegang kekuasaan paling tinggi. Segala bentuk stigmatisasi pada

perspektif perempuan dan laki-laki yang patriarki ini kemudian menjadi budaya yang diakulturasikan dalam tatanan sistem yang patriarkal. Maka budaya yang memberdayakan perempuan juga merupakan uraian panjang yang berdampak pada keberhasilan pemberdayaan perempuan di India.

Empat lensa Hemalata Dandekar pada akhirnya memutakhirkan empat poin yang saling menyempurnakan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan di suatu negara dikatakan berdaya apabila telah memenuhi empat poin esensial di atas (Dandekar 1986, 29).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis bersifat kualitatif dimana pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan berbasis pada bahan bacaan yang bersumber dari artikel jurnal, buku, website, dan literature lainnya dengan kata kunci yang signifikan yakni India, pemberdayaan perempuan, dan Narendra Modi.

Hasil dan Diskusi

Kebijakan BBBP Dalam Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi

Sebagai negara peringkat kedua dalam jumlah populasi dunia, India cenderung abai pada tata kelola sumber daya manusia, terutama ketika membahas soal eksistensi perempuan. Hal-hal seperti kesetaraan gender, diskriminasi, subordinasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban kapitalis masih terus dialami oleh perempuan India dewasa ini. Padahal tahun 2022 lalu menjadi tahun yang mencatat populasi

perempuan di India yang meningkat, dimana persentase penduduk perempuan sebesar 48,41% dan laki-laki sebesar 51.59% (Ellis 2021).

Perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan merujuk pada catatan kependudukan menyatakan hasil yang tidak terlalu signifikan, Dimana perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari fakta ini, pemerintah harus mengambil kebijakan inisiatif sebagai Langkah konkrit sebagai tindak lanjut keterbukaan partisipasi perempuan di ranah umum supaya dapat memaksimalkan potensi ekonomi. Sebab ketika disparitas ekonomi antara laki-laki dan perempuan tidak segera dibenahi, maka negara akan mengalami degradasi dalam berbagai macam sektor lanjutan. Maka dari itu, India perlu mulai melakukan berbagai macam upaya untuk menjustifikasi bahwa pemberdayaan perempuan memegang andil besar dalam pertumbuhan ekonomi (Mudoj 2020, 214).

Tahun 2014 menjadi tahun yang menyaksikan kesuksesan Narendra Modi yang diangkat menjadi Perdana Menteri India yang diusung dari partai *Bharatiya Janata Party* (BJP). Narendra Modi berhasil menggantikan Manmohn Singh dalam kedudukan sebelumnya (Goyal 2022). Dalam peraihan jabatan Perdana Menteri, Narendra Modi memiliki perhatian khusus pada beberapa isu yang kemudian dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan bagi India kala itu. Penguatan janji politik pada eskalasi ekonomi, minimnya angka pengangguran, dan penguatan ekonomi melalui investasi menjadi isu yang digaungkan dalam menggambarkan agenda politiknya. Salah satu langkah konkret Modi dalam sektor ekonomi India dan merupakan kebijakan yang paling berdampak pada masa kepemimpinannya adalah integrasi yang dilakukan Modi dalam tindakan pengambilan kebijakan yang menyeimbangkan skema kebijakan pusat dan kebijakan negara bagian.

Secara umum transisi masa kepemimpinan Narendra Modi ini memiliki aksentuasi pada reformasi ekonomi yang harus dipertahankan. Namun secara bersamaan segala bentuk kebijakan ekonomi yang dibentuk oleh Narendra Modi berjalan beriringan dengan adanya problematika struktural berupa harapan masyarakat yang semakin tinggi atas kebijakan yang menyehatkan masyarakat India.

Di bawah garis kekuasaannya yang menitikberatkan pada sektor ekonomi, Narendra Modi mempertegas bahwa kebijakan ekonomi domestik adalah prioritas. Terdapat lima kebijakan ekonomi yang telah dijalankan oleh Narendra Modi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di India yakni, “*Make in India*” yang merupakan sebuah kebijakan yang berasaskan pada keterbukaan akses seluas-luasnya di bidang industri maupun infrastruktur yang didukung oleh Kementerian Perdagangan dan Industri di India (Misra and Ghadai 2015, 97), digitalisasi India yang merupakan sebuah gagasan baru yang memanfaatkan kekuasaan internet dalam berbisnis dan melakukan aktivitas ekonomi lainnya (Bharti 2019, 2867), startup India berupa minat kewirausahaan digital yang menjulang tinggi dimana daya beli yang semakin tinggi dan berpotensi pada ekosistem bisnis digital (Chandiok, Sunita, and Dwarka BCIPS 2016, 90).

Kemudian *National Skills Development Mission of India* merupakan kebijakan yang menitikberatkan pada sebuah pelatihan *skill* atau kemampuan melalui program pemberdayaan dan pembekalan materi dari penduduk India yang berusia di bawah 25 tahun, dan kebijakan terakhir yakni *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* (Skema Inklusi Keuangan) adalah rancangan kebijakan ekonomi oleh Narendra Modi yang berfokus pada inklusivitas sektor finansial modern berupa kepemilikan atas rekening bank dan alur jaminan sosial berupa skema asuransi dan dana pensiun bagi

penduduk yang telah mengakhiri masa produktifnya (Dash and Dash 2020, 604).

Kelima kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan per kapita India dengan mode ekonomi yang bernuansa proteksionisme dan memanfaatkan digitalisasi yang memberlakukan keterbukaan ekonomi India terhadap negara lain. Ini berarti eksistensi Narendra Modi berhasil memajukan India dari sektor ekonomi dengan skala perhitungan GDP awal 15% menjadi 25% (Misra and Ghadai 2015, 97).

Ironinya, kebijakan yang termaktub dalam janji politik Narendra Modi juga tidak secara utuh menjabarkan peran penting perempuan yang juga mampu memberikan dampak berarti pada ekonomi di India. Jika mengacu pada penafsiran kata holistik dalam pembangunan maka rangkaian dalam mewujudkan kebijakan tersebut harus bersifat inklusif dan universal dengan mempertimbangkan peran perempuan dan bukan kebijakan yang dibuat hanya untuk tujuan teknokratis belaka (Mishra 2014, 400). Diperlukan adanya kebijakan retrospeksi yang pada akhirnya mampu mendukung perwujudan pembangunan holistik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk perempuan di dalamnya.

Secara historis, India pada tahun 2014-2015 sebelum kebijakan *BBBP* mengalami banyak tantangan yang menghambat pertumbuhan ekonominya. Sejumlah faktor yang dialami oleh perekonomian India saat itu salah satunya dipengaruhi oleh sektor ketenagakerjaan dan peningkatan pada jumlah pengangguran yang mencapai 7,5% (Ekarina and Indira 2019, 116). Hal ini karena minimnya partisipasi perempuan yang juga tergabung dalam aktivitas ekonomi India terutama di wilayah pedesaan. Hal ini mengindikasikan perlu adanya peninjauan ulang pada kebijakan publik di India yang menitikberatkan pada peningkatan perempuan dalam ekonomi (*Women Labor Participation*) (J. Ghosh 2016).

Untuk dapat menjustifikasi kebijakan ekonomi yang holistik maka dapat menilik evidensi kebijakan yang dilakukan pemerintah India di era Narendra Modi. Tahun 2015, muncul inisiatif kebijakan bernama *BBBP* yang diratifikasi oleh jajaran kabinet Narendra Modi. Pada dasarnya kebijakan *BBBP* bertujuan untuk menghilangkan disparitas gender dalam skema pembangunan negara melalui skema dua arah. Skema dua arah yang dimaksud yakni skema pencegahan dan skema pemberdayaan untuk menghasilkan spektrum yang lebih mengutamakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Kumar 2023, 20). Fokus dari kebijakan ini adalah untuk memberikan pendidikan bagi perempuan dan menyeimbangkan *sex ratio* antara laki-laki dan perempuan.

Pemerintah melihat bahwa pembangunan negara dimulai dari adanya pendidikan yang inklusif sehingga seluruh warga negara mendapat kesempatan yang sama. Dengan begitu, target dari kebijakan akan lebih siap terjun langsung di dunia kerja dan menjadi aset negara (Mittal 2021, 9). Uraian ini sejalan dengan penjabaran di atas bahwa populasi perempuan di India yang hampir menyamakan jumlah populasi laki-laki merupakan faktor penting dalam mencapai target negara. Maka dari itu upaya memberdayakan perempuan akan lebih cepat jika diberikan kesempatan yang peluang yang besar dari pemerintah (Mittal 2021, 10).

Menanggapi kebutuhan tersebut, dalam ranah kebijakan ekonomi hal disparitas gender mampu memberikan efek negatif pada neraca ekonomi (Kumar 2023, 20). Maka dari itu, kebijakan pemerintah mencoba untuk memvisualisasikan capaian keadilan bagi seluruh umat manusia dalam mengurangi segala bentuk penghilangan hal dan mereduksi ketimpangan yang dialami oleh warga negara India di bawah kepemimpinan Narendra Modi. Untuk dapat melakukan adanya pembangunan yang holistik, Narendra Modi menjanjikan slogan politiknya yang inklusif dengan tiga

segmentasi yakni, *acche din sabke liye* (hari baik untuk semua orang) *sabke sath*, *sabke pas* (dengan semua orang, dekat semua orang) (Himani 2016, 14).

Upaya pembangunan krusial yang diusung melalui kebijakan *BBBP* dalam sektor ekonomi adalah yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM melalui program-program keterlibatan komunitas dan kampanye kesadaran untuk memberdayakan perempuan melalui kebijakan peningkatan edukasi yang berfokus pada *skill-building* untuk menciptakan kesejahteraan yang mumpuni bagi perempuan di India (Dash and Dash 2020, 605). Melalui kebijakan ini kualitas sumber daya manusia akan lebih mumpuni, sehingga perempuan tidak lagi bergantung pada hal-hal yang bersifat dinamis karena mereka mampu memberdayakan diri mereka sendiri.

Sejak awal, pemerintah melihat kebijakan *BBBP* sebagai kebijakan yang holistik karena pengembangan kualitas sumber daya manusia yang digagas melalui kebijakan ini adalah kebijakan yang melihat sebuah proses sistematis. Dimana perempuan di India akan dibekali dengan kurikulum yang terkandung di dalam strategi kebijakan untuk memaksimalkan potensinya. Pembekalan ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan pendampingan oleh para ahli di bidangnya dalam mengatasi problematika yang menghambat perempuan India untuk tumbuh dan berkembang. Dari sini pemerintah menjamin seluruh perempuan di India untuk meraih kesempatannya secara maksimal dalam meraih potensinya sebagai tahap awal untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan (Kumar 2023, 22).

Kebijakan *BBBP* juga memberikan kesempatan yang besar pada partisipasi perempuan di ranah sosial yang merupakan indikator dari terciptanya pemberdayaan perempuan. Dengan adanya kebijakan inklusivitas yang berfokus pada edukasi ini akan menghasilkan perempuan

yang lebih berani dalam memaksimalkan potensi dalam menyampaikan gagasannya di ruang publik. Melalui kebijakan yang terkandung dalam *BBBP* pula, perempuan akan lebih tangguh dalam menghadapi ketidakadilan struktural yang menimpanya, sebab mereka telah memahami hak-hak dan kedaulatan mereka sebagai perempuan di India (Kumar 2023, 21). Ditambah lagi dengan adanya kesadaran akan hak-hak yang dimiliki perempuan, mereka akan cenderung melakukan proses pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas taraf hidupnya.

Kebijakan *BBBP* menjadi salah satu langkah mutakhir yang dibuat oleh pemerintah India di bawah masa kepemimpinan Narendra Modi (World Economic Forum, Trade and Investment 2017). Pasalnya sejak kebijakan ini diterapkan di India, eksistensinya memberikan sorotan yang menyiratkan adanya kesuksesan dari berbagai macam bidang terutama pendidikan yang berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi di dalam sebuah negara. Seperti naiknya raihan jumlah pelajar perempuan di India yang dengan antusias mengikuti program yang dibuat di dalam kebijakan *BBBP* sehingga terdapat upaya untuk meningkatkan pola produktivitas pada sektor ekonomi.

Pemerintah India juga mempertimbangkan bahwa kebijakan juga menjadi pola reformasi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetisi global. Pertumbuhan ekonomi sejak 2014 telah mengalami kesuksesan yang membawa India berada pada ranking 39 setelah stagnan di posisi ke 48 (Schwab 2016, 18).

India banyak melakukan peningkatan pada basis pendidikan yang berkontribusi besar yang menjadi persyaratan dasar bagi India untuk dapat terus memaksimalkan potensi warga negaranya (World Economic Forum, *India's growth is Outpacing China's. Here's How They Did It* 2016). Dalam hal ini, India juga perlu memberikan banyak kebijakan tambahan yang

mampu memberikan inklusipada pekerjaan formal bagi perempuan hingga persentase berubah dari 24% ke 30% dengan menghilangkan segregasi pada jenis pekerjaan yang potensial untuk perempuan (Relations 2016).

Bersamaan dengan itu, perubahan pada cara pandang masyarakat India yang lebih terbuka pada isu-isu yang mengarusutamakan perempuan, sehingga kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan di sektor ekonomi mengalami eskalasi (Pareek 2022, 352). Efek jangka panjang yang dihasilkan adalah mendatangkan keberagaman dan lingkungan yang inklusif di masyarakat di India sehingga tercipta lingkungan pembangunan yang holistik dan mendorong adanya kesetaraan gender. Inilah yang kemudian dimaksud oleh (Dandekar 1986, 26) tentang skema pemberdayaan perempuan yang melihat bahwa aspek ekonomi berkaitan erat dengan konsekuensi perempuan dalam perkembangan ekonomi mampu memberikan peningkatan bukan hanya pada ranah publik tetapi juga pada kenaikan status perempuan dalam ranah domestik.

Kebijakan BBBP Dalam Pemberdayaan Perempuan di Arena Publik dan Masyarakat

Pembangunan yang dimaksud tidak hanya berbicara soal dinamika ekonomi saja, tetapi juga terhadap inklusivitas yang diberikan dari pemegang kekuasaan terhadap warga negaranya melalui bidang-bidang lainnya. Inklusivitas yang dimaksud adalah adanya aktualisasi peran penduduk yang tidak bias gender, sehingga partisipasi publik terwakilkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa *status quo* perempuan masih harus mengalami lika-liku yang rumit (Ajizah and Khomisah 2021, 60).

Istilah ranah publik merupakan sebuah hal yang akhir-akhir ini kerap dikaitkan dengan konteks perempuan. Bahkan (Dandekar 1986, 26) melihat ranah publik sebagai area perempuan menjalankan perannya sesuai dengan

garis kehidupannya. Menilik kilas balik eksistensi perempuan yang lebih erat berada pada ruang domestik menjadikan konteks publik adalah sesuatu yang baru populer di abad ke-21. Secara umum, peran perempuan seringkali tidak dianggap penting dibanding peran laki-laki. Maka dari itu, keterwakilan perempuan di ranah publik jarang dijumpai di banyak negara di dunia, termasuk India. Hal ini terjadi karena adanya sistem patriarki yang dianut dalam setiap lini kehidupan masyarakat di India, sehingga terdapat resistensi bagi perempuan dalam berkecimpung di elemen publik (Cortis and Cassar 2005, 150).

Diantara banyaknya permasalahan yang dialami perempuan dalam keterlibatannya di publik, dapat dianalisis lebih jauh bahwa terjadi problematika ini karena dinamika kebijakan yang seringkali abai pada peran perempuan. Dengan demikian labelisasi perempuan yang erat dengan ranah domestik dan rumah tangga membawa pengaruh yang besar pada jalinan partisipasi perempuan di publik (Parmar and Sharma 2020, 1243). Satu diantara banyak cara yang dapat mengatasi permasalahan kurangnya keikutsertaan perempuan di ranah publik adalah pemberian peran dan tanggung jawab sama bagi perempuan, sehingga terdapat tendensi dari perempuan untuk turut aktif dalam dinamika sosial (Mishra 2014, 403).

Dengan diberikannya tanggung jawab yang utuh bagi perempuan secara substansial mampu memberikan prinsip liberalisasi bagi perempuan untuk dapat menyertai dirinya dalam kelompok sosial (Parmar and Sharma 2020, 1243). Sangat disayangkan India masih menjadi negara yang mengalami kerumitan dalam memberikan ruang terbuka bagi perempuan untuk untuk mewujudkan emansipasi. Maka dari itu, perlu adanya penguatan positif sebagai bentuk komitmen negara bagi perempuan yang bertujuan untuk memberikan ketertarikan pada perempuan agar terdorong untuk lebih aktif dalam berperilaku di lingkungan terbuka.

Sementara itu, India memiliki tugas besar untuk dapat memberantas budaya menomorduakan perempuan. Lantas menjadi penting bagi pemerintah India untuk melakukan proses perencanaan jangka panjang yang secara komprehensif melibatkan perempuan dalam tatanan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Hemalata Dandekar melalui karyanya "*Indian Women's Development: Four Lenses*" (Dandekar 1986, 26) bahwa terdapat hilirisasi yang terjadi antara variabel keikutsertaan perempuan di ranah publik dengan pengaruhnya pada sektor ekonomi maupun politik.

Jika dianalisis dari perspektif pembangunan, penekanan pada representasi perempuan dianggap sebagai sebuah upaya untuk memajukan negara dalam mewujudkan sistem negara yang demokratis. Pasalnya penekanan ini menjadi komitmen bagi negara dalam menjalankan perannya dalam mencapai target pembangunan bagi perempuan. India memiliki tiga prinsip yang ditekankan untuk bisa memaksimalkan potensi perempuan, yakni edukatif, integratif, dan memberdayakan (Mishra 2014, 404). Dari ketiga prinsip yang dimiliki pemerintah India untuk melanggengkan upaya keikutsertaan perempuan di ranah publik, maka kebijakan yang menjadi acuan dalam memaksimalkan potensi tersebut adalah kebijakan yang dibuat oleh Narendra Modi pada tahun 2015, yakni BBBP.

Pendekatan kebijakan BBBP dinilai kebijakan yang memiliki cakupan multi sektor yang berhasil memberikan dampak yang substansial pada kehidupan perempuan dalam basis kehidupan harian. Pemberian edukasi dan pembekalan yang diatur dalam kebijakan BBBP menjadi perempuan lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Di masa yang akan datang pemerintah mampu menjamin bahwa perempuan juga memiliki daya juang dan kompetisi yang lebih baik demi menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Sharma and Borgohain 2022, 5144).

Sejak dikeluarkan kebijakan *BBBP*, pemerintah India telah melakukan pemantauan yang berbasis pada ekspansi distrik di seluruh wilayah di India. Pada awal dikeluarkannya skema kebijakan ini distrik India hanya berjumlah 100 distrik, kemudian di tahun 2015-2017 mengalami eskalasi sebanyak 540 sehingga total menjadi 640 (Parmar and Sharma 2020, 1242). Terhitung tahun 2023, skema kebijakan *BBBP* sudah menjadi acuan di seluruh wilayah India. Hal ini memberikan dampak yang positif dalam menjamin perempuan dalam keikutsertaannya di ranah publik. Bukan hanya itu, pemerintah menjamin adanya perlindungan yang memastikan subjek hukum yang dalam hal ini perempuan mendapat hak sebagaimana mestinya secara administratif dan secara implementasi. Maka dari itu, secara sistematis pemerintah India dapat memaksimalkan potensi perempuan dalam memenuhi kebutuhannya secara pribadi karena pemerintah telah melakukan langkah mutakhir (Sharma and Borgohain 2022, 5144).

Lebih lanjut, munculnya kebijakan *BBBP* menjadikan masyarakat mulai mengubah cara pandang mereka ke arah yang lebih sadar terhadap tingkah laku mereka di publik. Berkat kebijakan ini, mereka cenderung mulai memahami bagaimana peran perempuan bukan hanya sebagai beban sosial melainkan rekan setara (Sharma and Borgohain 2022, 5145).

Dampak paling signifikan dari adanya perubahan pola pikir pada masyarakat mengenai keikutsertaan perempuan dalam ranah publik baik di lingkungan sosial maupun di ranah kerja dibuktikan oleh intensifikasi pada buruh dan tingginya angka pekerja di usia produktif (Motkuri and Naik 2016, 1). Tercatat dalam sensus penduduk yang dilakukan oleh National Sample Survey Office (NSSO) di India di tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat peningkatan sebesar 1.8% partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja di India. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan angka partisipasi ini diambil pada tahun yang sama dengan kebijakan *BBBP* mulai

diterapkan, sehingga ketika tahun 2015 hingga tahun 2017 angka partisipasi perempuan mengalami kestabilan.

Situasi ini tentunya memberikan keuntungan bagi perempuan untuk dapat memaksimalkan potensinya yang memiliki hak yang setara tanpa diversifikasi terhadap sektor-sektor tertentu termasuk keikutsertaannya di ranah publik. Dalam keberlangsungannya, kebijakan BBBP memberikan transisi pada dinamika pekerja perempuan yang berdampak pada pembangunan negara, sehingga kini kebijakan soal gender di ranah kerja menjadi fokus yang dikaji dalam perumusan kebijakan di dalam sidang pemerintah (Sarkar, Sahoo, and Klasen 2019, 292).

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan di ranah publik yang selama ini digadang-gadangkan oleh pemerintah mampu memberdayakan perempuan bukan hanya untuk kualitas hidup individunya saja, tetapi juga pada konteks yang lebih besar seperti pembangunan negara dan peningkatan mutu generasi yang akan datang. Sehingga perlu ada jaminan regulasi lanjutan yang mampu menaungi implikasi pemberdayaan perempuan dalam ranah publik ini. Mengingat India adalah negara dengan populasi yang cukup tinggi setiap tahunnya, maka terdapat perhatian penuh dari pemerintah untuk menjamin lapangan kerja yang memadai untuk dapat mengakomodasi jumlah warga negara yang membludak terutama pengarusutamaan pekerja perempuan di dalamnya.

Kebijakan BBBP Dalam Struktur Keluarga dan Posisi Perempuan dalam Independensi Karier

Pemberdayaan perempuan yang ditinjau dari segi partisipasi politik salah satunya dapat diukur dari jumlah representasi perempuan di dalam elemen politik. Dalam beberapa waktu terakhir, populasi perempuan menempati posisi sebanyak 48%, ini berarti perbedaan antara jumlah populasi laki-laki dan perempuan di India tidak memiliki jarak yang terlalu

jauh (Sharma 2020, 607). Akan tetapi, berbicara mengenai jumlah perempuan yang terjun ke dunia politik memiliki disparitas yang cukup signifikan. India masih cenderung mengglorifikasi jabatan publik terhadap laki-laki, sehingga jumlah yang dimiliki oleh perempuan lebih sedikit. Kendati demikian, pemerintah India memberlakukan sistem kuota sebagai upaya afirmatif yang mampu memberikan ruang bagi perempuan dalam berkecimpung ke ranah politik (Kurniaty 2015, 188). Tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai kesetaraan gender.

Tidak terlepas pada sistem kuota, India sebagai negara demokratis juga memiliki beberapa lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjamin dan memastikan perempuan mampu masuk ke dalam parlemen politik di India yang dikenal sebagai Komisi Pembatasan. Komisi ini dibentuk untuk memastikan terdapat perempuan yang masuk untuk mewakili aspirasi perempuan dalam perumusan kebijakan. Sementara itu untuk tetap memenuhi jumlah yang hadir dalam parlemen, pemerintah memberikan distribusi sebesar 30% yang memungkinkan perempuan hadir mewakili suaranya di sektor politik sebagai tokoh pejabat publik.

Hiruk-pikuk politik India belum bisa dikatakan mengalami perkembangan apabila tidak memiliki variasi gender dalam ruang politik. Titik balik kontestasi politik antara laki-laki dan perempuan dalam politik diwarnai oleh bergabungnya Indira Gandhi sebagai perdana menteri India ketiga yang merupakan perdana menteri perempuan pertama. Majunya Indira Gandhi menjadi langkah pengobaran semangat bagi perempuan India agar tergerak untuk terjun ke dunia politik (Sharma 2020, 608). Sejak saat itu, India mulai mengalami pertumbuhan dimana perempuan mulai terbuka pada kesempatannya untuk bergabung dalam elemen politik di India.

Untuk menjamin angka yang terus diwakilkan pemerintah India di bawah inisiatif kebijakan *BBBP* menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menggagas dan mengkampanyekan perlindungan yang rigid atas hak bagi perempuan yang melibatkan dirinya dalam politik (Ministry of Women & Child Development 2023). Dengan fokus ini, pemerintah dapat memberikan atensinya pada pola kepemimpinan yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi pada negara. Sebagai pendukung, pemerintah India juga menerapkan *affirmative action* yang merupakan sebuah skema penitikberatan peluang bagi perempuan dalam mewakili dirinya dalam institusi politik. Setidaknya penitikberatan perempuan dalam politik mampu meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik yang harapannya mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

Dua target utama diberlakukannya *affirmative action* oleh pemerintah India adalah sebagai berikut, pertama sebagai target keberlanjutan dari adanya *affirmative action* adalah mereduksi pola pikir seksisme dan hanya terfokus pada satu gender utama tanpa memberi kesempatan pada gender yang lain (Kurniaty 2015, 190). Kemudian target kedua yakni penghapusan bias gender yang memungkinkan meningkatnya relasi kuasa yang mampu merendahkan martabat perempuan (Meenakshi and Bakshi 2022, 10138).

Dalam menunjang langkah *affirmative action*, pemerintah India di bawah kepemimpinan Narendra Modi terus berpacu pada perjalanan negara menuju negara yang universal atau dalam kata lain negara yang holistik. Maka dari itu, segala aspek yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan di India menjadi target yang harus dicapai. Ditambah lagi India merupakan negara dengan status di bawah pengawasan pihak ketiga, sehingga perlu ada usaha lebih untuk dapat mewujudkan negara yang berkesetaraan.

Langkah mutakhir yang diambil pemerintah India dalam menyokong keterlibatan perempuan di ranah politik dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang linier dengan aspek pemberdayaan perempuan melalui ekonomi dan sosial, yakni kebijakan *BBBP*. Mengingat kebijakan ini adalah kebijakan holistik dimana semua aspek saling terkait dalam mengarusutamakan peran perempuan. Dalam konteks memberdayakan perempuan dalam politik, kebijakan ini melihat bahwa memberikan kuasa pada perempuan dan kesempatan untuk menduduki kursi pembuat kebijakan merupakan sebuah bentuk upaya menuju kesetaraan gender (Naik 2017, 729).

Kebijakan *BBBP* melihat adanya partisipasi perempuan di dalam dunia politik menjadi resolusi yang mampu mereduksi angka ketimpangan, karena perempuan dalam politik mampu mempengaruhi regulasi-regulasi yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan terdapat variasi sudut pandang dari tiap-tiap keterwakilan politik dalam pertimbangan kebijakan yang akan dibuat di semua spektrum, sehingga sistem negara yang demokratis dapat dijalankan dengan ideal (Naik 2017, 730). Basis dasar pelibatan perempuan dalam politik merupakan sebuah gagasan yang secara alamiah menggambarkan potret negara yang demokratis, karena terdapat kesempatan yang dibuka oleh negara terhadap warga negaranya (Equbal 2019, 64).

Namun terdapat tantangan dalam implementasi kepentingan yang dibawa ke dalam segmentasi politik. Seringkali hadirnya perempuan sebagai representasi politik yang diusung tidak serta merta memberikan kemudahan mencapai pemberdayaan. Justru kepentingan ini tidak sepenuhnya terwakilkan karena adanya dominasi politik yang masuk dan menimbulkan permasalahan yang menjadi hambatan bagi perempuan dalam menjalankan perannya dengan maksimal (Kurniaty 2015, 193). Representasi perempuan

ini menjadi alat untuk pemenuhan ambisi politik melalui legitimasi kebijakan yang dibalut dalam kerangka holistik.

Adanya perempuan dalam politik memiliki tujuan pokok sebagai variasi suara yang nantinya akan berpengaruh pada hasil akhir kebijakan yang bersifat universal, namun isu-isu yang diangkat dalam rapat politik seringkali isu-isu primordial yang merupakan kepentingan dari institusi pendukung perempuan tersebut (Kurniaty 2015, 193). Maka dari itu, beberapa hal yang pada akhirnya perlu diperhatikan oleh pemerintah India di era Narendra Modi adalah menjamin kekuatan perempuan dalam politik merupakan subjek penting dalam mewujudkan luaran yang inklusif dan holistik dengan cara menekankan skema kebijakan *BBBP*.

India memformulasikan representasi perempuan di legislasi politik adalah sebagai alat untuk mencapai pemberdayaan (Chandra 2016). Maka bersamaan dengan penerapan skema yang termaktub dalam kebijakan *BBBP*, perlu ada proses tawar menawar (*bargaining*) yang mengutamakan perempuan memiliki kekuatan untuk mempertahankan sarana dan sumber dayanya sebagai anggota legislatif (Meenakshi and Bakshi 2022, 10138).

Representasi perempuan dalam politik memiliki nilai substansial yang sama pentingnya dengan pemberdayaan perempuan yang dilihat dari sudut pandang pembangunan sosial ekonomi. Dimana keberhasilan pemberdayaan perempuan yang dapat terjadi dari perspektif sosial ekonomi tidak dapat mengalami keberlanjutan apabila tidak ada perempuan yang terjun ke dalam badan legislatif negara, karena perempuan memegang peranan sebagai penyeimbang keputusan-keputusan yang akan dibuat demi keberlangsungan hidup warga negara di India. Maka secara prinsip, negara perlu menjalankan intervensi untuk memastikan perempuan tergabung dalam jajaran politik dengan membawa isu spesifik yang mengacu pada kebutuhan-kebutuhan perempuan (Gautam and Sharma 2023, 192).

Itikad yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya mendapatkan kepercayaan perempuan untuk tergabung dalam dunia politik adalah membangun ekspektasi dengan memberikan jaminan perlindungan pada kebebasan berpendapat di ruang publik, prosedur resmi dan kontrak kerja yang manusiawi, dan pemastian pada luaran kebijakan yang bersifat universal (Dandekar 1986, 26). Artinya pemerintah menyediakan skema pemberdayaan yang bukan hanya meliputi ruang publik tetapi juga pada ruang domestik, karena perempuan seringkali diberatkan dengan tanggungan domestik yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam mengambil kesempatan. Hal ini berimplikasi pada jumlah keterwakilan perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki.

Memasuki periode pertamanya di tahun 2014 memberikan potret keberhasilan *affirmative action* dalam mengkuotakan perempuan dalam politik. Pemilu yang saat itu dilaksanakan pada tahun 2014, terdapat sebanyak 397 juta perempuan yang memiliki hak suara (Dhamija, Dhamija, and Kumar 2016, 5). Lebih lanjut, di tahun yang sama terdapat 668 perempuan yang turut berkontestasi dalam pesta demokrasi dan memegang sebesar 12% kekuatan politik (Dhamija, Dhamija, and Kumar 2016, 6).

Dari hasil rekap suara perempuan dalam pemilu 2014, dampak yang dihasilkan dari jumlah perempuan yang meningkat baru dapat dirasakan secara optimal setelah satu tahun masa jabatan yakni pada 2015 bahwa terdapat skema keseimbangan gender dalam proses demokrasi dimana terdapat tujuh menteri yang dipilih sebagai perwakilan kabinet.

Dari ketujuh legislatif terpilih menjadi bukti bahwa perempuan mampu memberdayakan dirinya melalui berbagai macam sektor apabila terdapat kesempatan yang dibuka. Menjadikan perempuan sebagai pejabat publik mampu memberikan refleksi bagi masyarakat bahwa terdapat komitmen besar India di bawah kepemimpinan Narendra Modi terhadap

pemberdayaan perempuan. Artinya secara keterwakilan perempuan dalam politik juga merupakan sebuah kewajiban untuk menyeimbangkan peran perempuan di ranah domestik dan di ranah publik yang dijamin formulasinya oleh negara. Efek jangka panjang yang akan dihasilkan dari berhasilnya perempuan yang maju ke dunia politik dapat secara langsung mendorong ekonomi India. Pasalnya politik juga mengatur soal bagaimana kebijakan publik dibuat, kebijakan pasar modal, pemberdayaan sosial, dan budaya masyarakat sebagai tonggak peradaban.

Kebijakan Beti BechaoBeti PadhaoPada Spektrum Psikologis/Ideologis Perempuan Dalam Budaya Masyarakat

Dalam menganalisis konteks budaya di India, (Dandekar 1986, 25) menegaskan bahwa budaya India akan berkorelasi dengan sistem kehidupan masyarakat India yang masih kental dengan sistem patriarki. Patriarki ini dimaknai sebagai sebuah keyakinan atau tabiat yang menomorsatukan laki-laki dalam setiap lini masa kehidupan, sehingga terjadi dominasi berkepanjangan dari gaya hidup ini yang menyebabkan perempuan menjadi kelompok yang inferior (Novela 2023, 818).

Menilik secara historikal India yang merupakan negara dengan catatan budaya patriarki yang kental bermula pada nilai-nilai patriarki yang tumbuh dan berkembang di lingkungan terkecil yakni keluarga (Dandekar 1986, 25). Dimana topik perempuan seringkali ditinggalkan karena dianggap tidak sepenting eksistensi laki-laki dan dinamika kehidupannya (Wahyudi 2018, 72). Sebuah ajaran kultural ini diterima oleh anak-anak di India yang kemudian menjadi panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari (Prasetyo and Asbari 2023, 217). Parahnya lagi penerimaan nilai-nilai patriarki ini dijadikan cara pandang oleh masyarakat India.

Di India, hasil konstruksi sosial tentang patriarki telah mengakar bukan hanya pada cara pandang masyarakat tetapi juga kualitas hidup warga

negaranya. Pemahaman masyarakat luas yang masih terpaku pada dominasi yang begitu kuat menjadikan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dalam memberdayakan dirinya sendiri (Chandra 2016, 4). Kiprah perempuan seringkali diabaikan karena sejak awal prinsip patriarki melahirkan gagasan bahwa perempuan bukan prioritas yang harus diperhatikan. Ironisnya cara pandang seperti ini tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga tetapi juga pada kancah politik dan pembangunan negara (Wahyudi 2018, 80).

Budaya patriarki yang terus berkembang seiring berjalannya waktu menjadi tantangan yang tak berujung bagi India. Budaya patriarki seringkali menjadi hambatan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan negara, terutama ketika membahas mengenai pembangunan yang berkelanjutan (Wahyudi 2018, 66). Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin modern dunia, maka terdapat transisi pada pola pikir dan tindakan yang diambil oleh negara dalam menyetarakan kedudukan negara seiring dengan globalisasi.

Implikasi jangka panjang yang dihasilkan dari budaya ini adalah lingkungan sosial yang mengamini nilai-nilai patriarki. Lebih parahnya nilai-nilai ini kemudian diterapkan dalam kehidupan tingkat lanjut yakni kebijakan yang tidak bersifat universal, penomorduuan perempuan dalam ranah publik serta stagnannya pembangunan negara (Wahyudi 2018, 64). Stimulasi nilai-nilai patriarki membawa dampak yang amat serius apabila tidak ditangani secara progresif, sebab sesuatu yang berkaitan dengan pola pikir akan sulit untuk dibenahi jika tidak terdapat gebrakan yang mampu menembus batas pikiran manusia tersebut.

Masyarakat penganut nilai-nilai patriarki cenderung memiliki pola pikir statis dan menutup akses terhadap dirinya untuk berkembang (Rawat 2014, 47). Hal ini disebabkan terdapat kepercayaan pada apa yang selama ini

menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kenyataannya pola pikir yang tidak berkembang ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap kualitas sumber daya manusia. Bukan tanpa alasan, kuatnya pola pikir masyarakat dan budaya yang terus menerus tumbuh ini menjadikan sulitnya mendapat perubahan.

Untuk mengatasi budaya patriarki yang masif diperlukan pendekatan multidimensi sebagai metode untuk memfasilitasi pemahaman mendalam tentang pembangunan (Rawat 2014, 45). Berfokus pada nilai-nilai inklusif dan partisipasi publik yang besar akan berdampak pada pembangunan konstan suatu negara. Mengingat budaya patriarki adalah akar dari tidak tercapainya pemberdayaan perempuan secara optimal. Menjadi sia-sia apabila pemberdayaan perempuan yang dimaknai oleh Hemalata Dandekar pada tahun 1986 melalui karyanya yang berjudul “Indian Women’s Development: Four Lenses” (Dandekar 1986, 29) tidak dapat mencakup empat poin utamanya. Budaya dalam proses pemberdayaan perempuan menjadi sebuah capaian yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, partisipasi publik dan jumlah keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini disebabkan budaya adalah kepercayaan yang mampu mempengaruhi segala aspek kehidupan (Spencer-Oatey 2012, 3).

Beberapa relevansi yang menjadi tantangan tersendiri adalah seberapa signifikan kebijakan ini mampu memberikan dampak perubahan budaya yang mengarusutamakan perempuan. Melalui problematika ini, Narendra Modi mampu menciptakan budaya yang mengedepankan harkat dan martabat perempuan dengan menjamin hak-hak dasar dan kesempatan yang diatur dalam hak advokasi legal (Kumar 2023, 21). Selain itu, Narendra Modi juga meyakini bahwa pemberdayaan dibentuk dari tonggak kehidupan yang menyadari bahwa pada akhirnya semua warga negara memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diferensiasi dari aspek-aspek tertentu termasuk gender (Rawat 2014, 45).

Melalui kebijakan *BBBP* dan pendekatannya yang bersifat multisektoral, Narendra Modi melakukannya dengan metode intervensi sebagai skema asesmen yang berdampak pada pengarusutamaan perempuan (Saini 2018, 228). Skema intervensi dilakukan dengan berkolaborasi bersama Departemen Administrasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk meningkatkan kesadaran pada kebijakan *BBBP* (Gupta, Nimesh and Lal Singal 2018, 871). Salah satunya adalah dengan membiasakan masyarakat melihat logo dan stempel kebijakan yang merupakan komitmen pemerintah untuk mengedepankan perempuan dalam pembangunan negara dan mempromosikan penerimaan masyarakat akan hadirnya perempuan di masyarakat (Gupta, Nimesh and Lal Singal 2018, 871).

Narendra Modi menganut prinsip *grassroot* yang memungkinkan terjadinya perubahan dari bawah ke atas. Ditegaskan dalam laporan yang direkapitulasi oleh United Nations Development Programme bahwa negara berkembang cenderung lebih mudah terpengaruh oleh kebijakan yang dimulai berbasis pada pendekatan *grassroot* (Manor 2003, 12). Hal ini tentu berpengaruh pada dampak kebijakan yang dirasa dekat dengan masyarakat, serta memiliki hasil yang instan (Manor 2003, 23).

Jika budaya pengarusutamaan perempuan telah mengakar pada prinsip hidup baik domestik maupun umum, maka dapat dipastikan bahwa luaran dari budaya ini mampu menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkualitas di India. Pasalnya pertumbuhan dan perkembangan India akan dipengaruhi oleh empat poin utama yakni pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, partisipasi perempuan di ranah publik serta budaya non-patriarki yang melekat dalam pedoman hidup manusia (Dandekar 1986, 26).

Secara spesifik, budaya dalam skema pemberdayaan perempuan yang diamini oleh (Dandekar 1986, 27) merupakan poin yang berbanding lurus dengan faktor politik dan sosial. Hal ini disebabkan proses yang inheren melihat konsistensi pemerintah dalam menentukan arah gerak politik India yang memicu perkembangan kelompok publik terhadap determinasi perempuan di lingkungan sosial mereka.

Maka untuk mempromosikan budaya pengarusutamaan perempuan diperlukan langkah stabil yang ditengarai oleh pemerintah Narendra Modi (Ghosh 2018, 84), Langkah stabil yang menjadi prinsip dalam menjalankan kebijakan ini adalah dengan melakukan metode pembiasaan dengan cara persuasi kepada khalayak public melalui penyebaran informasi dan berkolaborasi dengan tokoh publik untuk mengenalkan kebijakan *BBBP* secara luas (The Economic Times 2023). Sehingga kebijakan *BBBP* mampu menjadi solusi dalam kondisi masifnya beban subordinatif yang masih terjadi di India dengan menyadarkan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah menyetarakan potensi yang dimiliki tiap-tiap manusia dalam membangun negara (Ghosh 2018, 84).

Kesimpulan

Pada dasarnya pemberdayaan perempuan merupakan sebuah diskursus yang dalam dewasa ini menjadi perhatian dunia. Banyak negara di dunia yang berambisi dalam mengarusutamakan isu-isu perempuan dan pemberdayaan melalui program-program negara yang visioner. Bagi sebuah negara mengimplementasikan pemberdayaan perempuan bukan sebuah hal yang mudah, diperlukan sistematisa khusus yang mampu mencakup skema pemberdayaan yang dimulai dari tahap paling kecil ke tahapan paling mutakhir. Diperlukan partisipasi kolektif dalam menjalankan proses memberdayakan perempuan, mulai dari birokrasi negara hingga koherensi pemerintah dengan warga negaranya. Tahapan-tahapan ini juga menjadi

tantangan tersendiri bagi tiap-tiap negara dalam mengaktualisasikan pemberdayaan perempuan. Pasalnya isu perempuan baru populer di abad ke-21, dimana awalnya perhatian negara hanya terpaku pada isu primordial dan militer saja, sehingga menjadi hal baru bagi masyarakat global termasuk entitas politik dalam memahami bahwa terdapat isu penting yang berkorelasi dengan eksistensi perempuan.

Membahas mengenai dinamika perempuan merupakan ranah domestik atau privat, sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak luar termasuk pemerintah. Hingga pada akhirnya maraknya kasus yang terjadi pada perempuan yang menjadi korban dari berbagai macam masalah menyeruak dan menarik perhatian entitas politik yang dalam hal ini adalah negara. Kasus yang terjadi seringkali melibatkan perempuan sebagai korban yang tak punya kuasa dalam mempertahankan eksistensinya di ranah domestik. Hal ini terjadi karena perempuan selalu dianggap lemah dan tak berdaya, sehingga dianggap layak menjadi korban. Permasalahan yang terjadi pada perempuan tentu saja menyudutkan posisi perempuan yang tidak punya perlindungan secara komprehensif dari negara.

UN Women dalam Konvensi CEDAW sebagai pihak ketiga pada 2015 yang menyatakan India perlu melakukan gebrakan dengan kredibilitas tinggi untuk memberdayakan perempuan dari tiga poin utama yakni ekonomi, politik, dan sosial dengan melakukan administrasi pemerintahan yang akuntabel dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan tuntutan yang muncul, demi mewujudkan pemberdayaan perempuan, pemerintah India di masa Narendra Modi periode pertama mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai *BBBP*. Diratifikasi pada tahun 2015, kebijakan ini merupakan kebijakan yang dinilai sebagai kebijakan yang holistik. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang bersifat multi sektor yang mencakup dinamika kehidupan perempuan di India.

Kebijakan *BBBP* memberikan skema inklusif yang bertujuan untuk memberdayakan peran perempuan mulai dari ranah domestik hingga ranah publik. Secara komprehensif, kebijakan ini mengatur sektor pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan kemampuan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberikan pengarahan pada partisipasi perempuan di ranah publik, jaminan terhadap keterwakilan perempuan di dunia politik, serta budaya pengarusutamaan perempuan dalam sektor-sektor lainnya.

Narendra Modi kemudian menggunakan kebijakan *BBBP* untuk menjawab tuntutan yang diberikan dari UN Women dalam mengoptimalkan pemberdayaan perempuan. Maka dari itu, kebijakan ini pada akhirnya mencakup banyak aspek yang memberikan ruang terbuka bagi perempuan untuk mengedepankan potensinya dalam memberdayakan dirinya sendiri. Perempuan diberikan kekuatan dan jaminan dari negara untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi.

Daftar Pustaka

- Afghanistan International News. 2022. World Food Programme Trains 50,000 Afghans with Marketable Skills. <https://www.afintl.com/en/202209226727>.
- Ahmadi, Attaullah. 2021. "Food security and COVID-19 in Afghanistan: a two-sided battlefield - Tropical Medicine and Health." *Tropical Medicine and Health*.
- Aivanni, Nur. 2021. "Separuh Warga Afghanistan Terancam Krisis Pangan Ekstrem." *Media Indonesia*, October 25, 2021.
- Armstrong, Martin. 2021. "Chart: Afghanistan's Food Crisis Reaches Unprecedented Levels." Statista.

<https://www.statista.com/chart/26339/afghanistan-acute-food-insecurity-sn-aphot-figures/>.

Australian Aid. 2021. “Regional Humanitarian Strategy for Afghanistan and Pakistan 2021-2024.” Department of Foreign Affairs and Trade. <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/regional-humanitarian-strategy-afghanistan-pakistan-2021-2024.pdf>.

BBC News Indonesia. 2021. “Afghanistan: Perang selama dua dekade, berikut fakta-faktanya dalam 10 pertanyaan.” *BBC*, July 11, 2021.

Buchholz, Katharina. 2021. “Infographic: Afghan Population Faces Food Crisis in Upcoming Winter.” Statista. <https://www.statista.com/chart/26068/afghanistan-food-shortage/>.

Butz, Leah, Alexina Cather, and Regan E. Murray. 2021. “Food Insecurity in Afghanistan.” NYC Food Policy Center. <https://www.nycfoodpolicy.org/food-insecurity-in-afghanistan/>

Call, Charles T. 2011. “Beyond the ‘failed state’: Toward conceptual alternatives.” *European Journal of International Relations* 17(2) (June): 303-326. DOI:10.1177/1354066109353137.

Clarke, Paul. 2004. “Food Security and War in Afghanistan.” *The Society of International Development*. *SAGE Publications*, (January), 113-119.

Damayanti, Aulia. 2021. “Mengintip Sumber Ekonomi Afghanistan yang Tak Cuma dari Opium.” *detikFinance*, September 3, 2021. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d->

[5707662/mengintip-sum-ber-ekonomi-afghanistan-yang-tak-cuma-dari-opium](https://doi.org/10.5707662/mengintip-sum-ber-ekonomi-afghanistan-yang-tak-cuma-dari-opium).

Dewanti, Elin. 2018. "Peranan World Food Programme (WFP) Melalui Program Food For Assets (FFA) Dalam Upaya Mengurangi Potensi Rawan Pangan di Indonesia (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)." *Global Political Studies Journal* Vol. 2 No. 2 (Oktober): 114- 115.

Elmasry, Isabella. 2022. "The State of Food Systems in Afghanistan." The Borgen Project. <https://borgenproject.org/food-systems-in-afghanistan/>.

FEWS NET. 2021. "Afghanistan Food Security Outlook June 2020 to January 2021." *Famine Early Warning Systems Network*, Januari, 2021. https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/AFGHANISTAN_Food_Security_Outlook_FINAL.pdf.

Gannon, Kathy, Rahim Fairez, and Edith M. Lederer. 2021. "Afghans face hunger crisis, adding to Taliban's challenges." *AP News*, September 1, 2021.

Global Network Against Food Crises. 2022. "Hunger Hotspots - FAO-WFP early warnings on acute food insecurity." Food and Agriculture Organization of [the United Nations](https://www.fao.org/3/cc2134en/cc2134en.pdf). <https://www.fao.org/3/cc2134en/cc2134en.pdf>.

Greenfield, Charlotte, and Alexandra Hudson. 2022. "Taliban increase payment in wheat as economic crisis deepens." *Reuters*, January 11, 2022. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-increase-payment-wheat-economic-crisis-deepens-2022-01-11/>

- Hariani, Rani. 2017. “Peran World Food Programme (WFP) dalam menangani Krisis Pangan di Sierra Leone Tahun 2009-2011.” *JOM FISIP* Vol.4 No.1 (Februari): 1-13.
- Hashimi, Hoshang. 2021. “Taliban launches food-for-work programme to tackle hunger crisis.” *Euronews*, October 25, 2021. <https://www.euronews.com/2021/10/25/taliban-launches-food-for-work-programme-to-tackle-hunger-crisis-in-afghanistan>.
- Japan International Cooperation Agency. 2022. “Signing of Grant Agreement with FAO for Afghanistan: Contributing to the enhancement of agricultural productivity as well as the improvement of farmers’ livelihoods | Press Releases | News & Features.” JICA.
- Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2008. *International Organizations and Implementation. Enforcers, managers, authorities?* 1st ed. N.p.: Routledge Taylor & Francis Group.
- Khorinna, Made A., Idin Fasiska, and Adi P. Suwecawangsa. 2018. “Peran World Food Programme (WFP) dalam Membantu Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia Tahun 2012-2015.” *Jurnal Hubungan Internasional* Vol 1 No 2:1-11.
- Knight, Ben. 2022. “Jerman Tangguhkan Bantuan Kemanusiaan bagi Afganistan – DW – 29.12.2022.” *DW*, December 29, 2022. <https://www.dw.com/id/jerman-tangguhkan-bantuan-kemanusiaan-bagi-afganistan/a-64230835>.
- Lutz, Jamie, and Jacob Kurtzer. 2021. “What the Taliban Takeover Means for Food Security in Afghanistan.” Center for Strategic and

International Studies | <https://www.csis.org/analysis/what-taliban-takeover-means-food-security-afghanistan>.

Mengli, Ahmet. 2022. "Afghanistan's new poor line up for aid to survive as food crisis bites." *CNN*, May 22, 2022. <https://edition.cnn.com/2022/05/22/asia/afghanistan-hunger-new-poor-intl-cmd/index.html>.

Milandry, Amastya F. 2021. "Peran World Food Programme (WFP) dalam menangani Krisis Pangan di Suriah Tahun 2018-2020." *JOM FISIP* Vol. 8 Edisi 1 (Januari-Juni): 1-14.

Mohammed, Arshad, and Andrea Shalal. 2021. "Exclusive: World Bank backs using \$280 mln in frozen aid funds for Afghanistan." *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-world-bank-backs-u-sing-280-million-frozen-aid-funds-afghanistan-2021-12-01/>.

Najafizada, Eltaf, and Golnar Motevalli. 2022. "Climate change is making Afghanistan's hunger crisis worse." *Phys.org*, April 6, 2022. <https://phys.org/news/2022-04-climate-afghanistan-hunger-crisis-worse.html>.

Ndaru, Herjuno. 2005. "Peran UN dan UN World Food Programme dalam Penanganan Krisis Pangan dan Kelaparan: Studi Kasus "Silent Hunger" di Niger." *Global: Jurnal Politik Internasional* Vol. 8, No. 1 (September): 51-67.

O'Connor, Daniel, Philip Boyle, Suzan Ilcan, and Marcia Oliver. 2016. "Living with Insecurity: Food Security, Resilience, and The World Food Programme (WFP)." *Global Social Policy*, (Juli), 1-18. DOI: 10.1177/146801811/6658776.

- Omer, Sevil. 2022. "Afghanistan crisis: Facts, FAQs, and how to help." World Vision. <https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/afghanistan-crisis-facts#fast-facts>.
- Oskorouchi, Hamid R., and Alfonso S. Poza. 2020. "Floods, food security, and coping strategies: Evidence from Afghanistan." *The Journal of the International Association of Agricultural Economists*, (June), 123-140.10.1111/agec.12610.
- Pajhwok. 2021. "WB approves \$97.50m grant for Afghanistan – Pajhwok Afghan News." Pajhwok Afghan News. <https://pajhwok.com/2021/02/17/wb-approves-97-50m-grant-for-afghanistan/>.
- Panetta, Alexander. 2021. "U.S. leaves the 'graveyard of empires': A look at the legacy of the war in Afghanistan." *CBC*, July 18, 2021. <https://www.cbc.ca/news/world/us-exits-afghanistan-legacy-1.6105893>.
- Purwaningsih, Yunastiti. 2008. "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9, No. 1 (Juni): 2.
- Reditya, Tito H. 2022. "Afghanistan Kelaparan, Tingkat Rawan Pangan Capai Fase Bencana." *Kompas*, Mei 10, 2022.
- ReliefWeb. 2022. "Afghanistan: Integrated Food Security Phase Classification Snapshot | March - November 2022 - Afghanistan." ReliefWeb. <https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-integrated-food-security-phase-classification-snapshot-march-november>.

Ross, D. A. 2008. "Making a meal of it: the World Food Programme and legitimacy in global politics." *Minerva Access*.

Said, Endang G. 2011. "Kecenderungan Permasalahan Pasokan Pangan Global dan Antisipasinya Bagi Indonesia." *Jurnal Pangan Perum Bulog* Vol. 20 No. 2.

Samim, S. A., and H. Zhiqian. 2020. "Assessment of Food Security Situation in Afghanistan." *SVU-International Journal of Agricultural Sciences* Vol 2 (Issue 2): 356-377.

Sicca, Shintaloka P. 2021. "Perjalanan Panjang Sejarah Afghanistan dari Zaman Kuno hingga Sekarang Halaman all." *Kompas.com*, September 11, 2021.
<https://internasional.kompas.com/read/2021/09/11/084004070/p-erjalanan-panjang-sejarah-afghanistan-dari-zaman-kuno-hingga-sekarang?page=all>.

Sommerville, Quentin. 2022. "Afghanistan crisis: Taliban expands 'food for work' programme." *BBC*, January 12, 2022.

Sorongon, Tommy P. 2021. "Taliban Kejepit, Bank Sentral-IMF Blokir Akses ke Aset." *CNBC Indonesia*.

TOLONews. 2014. "Afghanistan, the World's 7th Fragile State."

TOLONews, June 26, 2014. <https://tolonews.com/afghanistan/afghanistan-worlds-7th-fragile-state>.

U.S. Government Publishing Office. 2011. "Evaluating U.S. Foreign Assistance To Afghanistan." GovInfo.
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CPRT-112SPRT66591/html/CPRT-112SPRT66591.htm>.

Umam, Khotibul. 2021. “Kebijakan Ashraf Ghani Terhadap Kembali Berkuasanya Kelompok Taliban di Afghanistan Tahun 2021.” *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)* Vol.1 No.1:257-266.

World Food Programme. 2019. “General Regulations General Rules Financial Regulations Rules of Procedure of The Executive Board.” WFP Document Storage & Index Server. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/>.

World Food Programme. 2022. “Ethical culture | World Food Programme.” WFP. <https://www.wfp.org/ethical-culture>.

World Food Programme. 2022. “Introduction to Programme and Policy.” WFP Executive Board. https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000132607.

World Food Programme. 2004. “A Report from the Office of Evaluation.” In *Full Report of the Evaluation of Afghanistan PRRO 10233*. Rome: World Food Programme.

World Food Programme. 2022. “Afghanistan | World Food Programme.” WFP. <https://www.wfp.org/countries/afghanistan>.

World Food Programme. 2022. “Days of Activism Against Gender Based Violence.” WFP Afghanistan Country Brief. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP->

0000145588/download/?_ga=2.2 00455145.613540705.1674112247-1957589455.1674112247.

World Food Programme Annual Country Report. 2018. “Afghanistan Annual Country Report 2021.” *Country Strategic Plan 2018 - 2022*.

World Food Programme Annual Country Report. 2019. “Afghanistan Annual Country Report 2021.” *Country Strategic Plan 2018 - 2022*.

World Food Programme Annual Country Report. 2020. “Afghanistan Annual Country Report 2021.” *Country Strategic Plan 2018 - 2022*.

World Food Programme Annual Country Report. 2021. “Afghanistan Annual Country Report 2021.” *Country Strategic Plan 2018 – 2022*.